

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA



LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TAHUN 2021

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT akhirnya dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 dapat diterbitkan. Buku ini memberikan gambaran pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar selama Tahun Anggaran 2021.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban membuat Laporan Pelaksanaan Tugas Unit Kerja Tahun 2021 yang menjelaskan pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran sebagai manifestasi pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah.

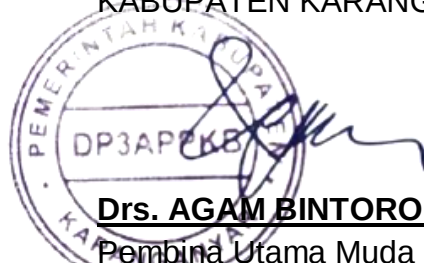
LPT mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masyarakat. Bagi Pemerintah Daerah, LPT dapat dijadikan sebagai tolok ukur (*benchmark*) dalam menilai kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar yang bertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan selama 1 tahun anggaran. Sedangkan bagi masyarakat, LPT dapat dijadikan acuan untuk menilai kinerja perangkat daerah untuk perbaikan mutu pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat pada tahun berikutnya.

Besar harapan kami, dokumen LPT ini memberi manfaat bagi kita bersama dalam menetapkan kebijakan di bidang kesehatan. Tidak lupa kami mohon maaf atas kekurangan di dalam penyusunan dokumen LPT, dan mohon saran dan masukan untuk penyempurnaan dokumen LPT.

Karanganyar,

Januari 2022

KEPALA DP3APPKB
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. AGAM BINTORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19650601 199203 1 007

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum	3
	C. Maksud dan Tujuan	4
BAB II	DESKRIPSI SKPD/OPD	
	A. Tugas Pokok dan Fungsi (Tugas dan Fungsi sesuai Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Perbup)	6
	B. Standar Operating Procedure (SOP) SKPD/OPD	7
	C. Perda/Perbup Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	8
	D. Struktur Organisasi (Bagan Struktur Organisasi sesuai Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)	9
	E. Kepegawaian Berdasarkan Urusan Yang Dilaksanakan	11
BAB III	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	14
	B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	14
BAB IV	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
	A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	20
	B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	20
BAB V	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	
	A. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	37
BAB VI	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
	A. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	38
BAB VII	INOVASI DAN PENGHARGAAN	
	1. INOVASI	39
	2. PENGHARGAAN	39
BAB VIII	PENUTUP	
	1. KESIMPULAN	40
	2. SARAN	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16) Urusan wajib konkuren pelayanan non dasar pengendalian penduduk dan urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak merupakan program pelayanan non dasar yang mempunyai kontribusi yang sangat berarti bagi pembangunan sumber daya manusia. Karena dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana diupayakan terus peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, serta menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada kemandirian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyetaraan gender, perlu diupayakan peningkatan kualitas SDM dan penyetaraan gender di semua bidang, peningkatan perlindungan tanpa kekerasan bagi perempuan dan anak, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta meningkatnya keluarga yang menerapkan norma keluarga kecil bahagia

Secara umum pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana khususnya di Kabupaten Karanganyar tahun 2021 telah melaksanakan upaya-upaya yang

bermakna untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Disamping itu juga beberapa upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas, serta dalam menurunkan angka kesakitan, kematian Ibu dan bayi termasuk upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga, dan ketahanan keluarga.

Program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program nasional yang strategis, ditengah berbagai dinamika politik, pemerintahan, dan sosial ekonomi, pemerintah tetap memberikan komitmen pada penggarapan program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Olehkarenaitupelaksanaanprogram Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021, tidak lagi hanya berorientasi pencapaian kuantitas tetapi juga berupaya mewujudkan kualitas penduduk.

Dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karanganyar, sebagai bentuk penerapan operasional dari bagian pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana secara Nasional, program tersebut juga diakomodir melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar. Kemudian dengan era otonomi daerah seperti sekarang, RKPD tersebut diharapkan dapat dipakai pijakan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan demikian operasional program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Karanganyar tetap perlu dikelola secara lebih serius, profesional dan berkesinambungan sehingga upaya tersebut dapat memberikan kepuasan semua pihak yang

pada akhirnya akan dapat mewujudkan kualitas penduduk dan kualitas keluarga, dengan karakteristik antara lain mempunyai anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan, terpenuhi hak-hak reproduksinya. Pada akhirnya benar-benar terwujud keluarga kecil berkualitas, dan terjadinya penduduk tumbuh seimbang.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka perlu dibuat laporan pelaksanaan tugas tahun 2021.

B. Dasar Hukum

Pembuatan Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2021 berdasarkan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang LKPJ, LPPD dan ILPD
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2018.tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021.
- 12.Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021
- 13.Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud.

Penyusunan Laporan penyelenggaraan tugas ini dimaksudkan :

- a. Sebagai laporan pertanggung jawaban kepada Bupati atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan selama tahun2021;
- b. Sebagai input bagi pemerintah daerah dalam mengukur capaian kinerja dan hasil yang telah di capai dari berbagai program/kegiatan;
- c. Sebagai bentuk tanggungjawab OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan penyelenggaraan tugas ini bertujuan :

- a. Mengendalikan OPD secara efektif dan efisien, sampai pada implementasi dalam mencapai tujuan dan sasaran;
- b. Sebagai bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Sebagai bahan bagi Bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada periode selanjutnya.;
- d. Sebagai bahan bagi bupati untuk melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada periode selanjutnya.

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	URAIAN
1	NIHIL

BAB V

**CAPAINAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN**

NO	URAIAN
1	NIHIL

BAB VI

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

NO	URAIAN
1	NIHIL

BAB IV

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Nihil

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	KBJK. STRA.	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
1.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		a. Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Anggaran: Rp. 27.500.000,00 Realisasi: Rp. 23.673.300,00 Persentase: (86,08%)	Tersusunnya laporan RKA DPA,RKAP DP AP,SPIP,Sirup, LKJIP,LPT,SIP D, dan renstra 10 laporan	10 laporan (100.00%)		
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Anggaran: Rp. 3.921.726.000,00 Realisasi: Rp. 3.768.757.948,00 Persentase: (96,10%)	Tersedianya Gaji ASN 1 Tahun	1 Tahun (100.00%)		
				2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Anggaran: Rp. 20.000.000,00	Tersusunnya laporan RKA DPA,RKAP DP AP,SPIP,Sirup,, SOP, LKJIP,LPT,SIPD, dan	11 laporan (100.00%)		

				Realisasi: Rp. 16.997.500,00 Persentase: (84,99%)	renstra 11 laporan			
			c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Anggaran: Rp. 11.508.400,00 Realisasi: Rp. 10.744.400,00 Persentase: (93,36%)	komponen instalasi listrik 1 jaringan listrik, Indikator 1 22 macam	1 jaringan listrik, macam (50.00%)		
				2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 12.693.150,00 Persentase: (84,62%)	Terlaksananya penyediaan minuman untuk pegawai 5 jenis, Indikator 1 1 tahun	5 jenis, tahun (50.00%)		
				3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Anggaran: Rp. 13.797.000,00 Realisasi: Rp. 13.394.500,00 Persentase: (97,08%)	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				4) Fasilitas Kunjungan Tamu Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.894.000,00	Tersedianya makan dan minuman rapat dan jamuan tamu 1 tahun	1 tahun (100.00%)		

				Persentase: (98,94%)				
				5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Anggaran: Rp. 92.736.000,00 Realisasi: Rp. 90.604.167,00 Persentase: (97,70%)	Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
			d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 4.000.000,00 Persentase: (80,00%)	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 1 unit	1 unit (100.00%)		
			e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Anggaran: Rp. 25.000.000,00 Realisasi: Rp. 23.008.800,00 Persentase: (92,04%)	Terkelolanya surat masuk dan surat keluar 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Anggaran: Rp. 89.832.000,00 Realisasi: Rp. 72.900.545,00 Persentase:	Terbayarnya tagihan jasa kantor 1 tahun	1 tahun (100.00%)		

				(81,15%)				
				3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Anggaran: Rp. 81.578.000,00 Realisasi: Rp. 80.279.800,00 Persentase: (98,41%)	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
		f.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran: Rp. 100.203.000,00 Realisasi: Rp. 96.818.500,00 Persentase: (96,62%)	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Anggaran: Rp. 18.000.000,00 Realisasi: Rp. 17.425.000,00 Persentase: (96,81%)	Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 bulan	12 bulan (100.00%)		
				3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Anggaran: Rp. 13.105.600,00 Realisasi: Rp. 12.559.200,00	Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun	1 tahun (100.00%)		

				Persentase: (95,83%)				
			g. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 20.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				2) Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 15.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
			h. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 23.925.000,00 Realisasi: Rp. 22.375.000,00 Persentase: (93,52%)	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten 1 tahun,	1 tahun, 100 % (100.00%)		

					Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten 100 %			
				2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 15.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
		i. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 30.000.000,00 Realisasi: Rp. 30.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan 1 tahun	1 tahun (100.00%)			

			Kewenangan Kabupaten/Kota					
				2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 163.520.000,00 Realisasi: Rp. 1.309.000,00 Persentase: (0,80%)	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten 1 tahun	1 tahun (100.00%)	Sumber Dana tersebut berasal dari DAK dan pada Polres sudah terdapat Anggaran dengan kegiatan dan peruntukan yang sama sehingga pada anggaran DP3APPKB tidak diambil	Kembali Kas Daerah
		j.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 12.404.000,00 Persentase: (82,69%)	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
		k.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	1) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Terlaksananya KIE PHA pada lembaga penyedia layanan 1	1 tahun (100.00%)		

			Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 80.000.000,00 Realisasi: Rp. 75.547.000,00 Persentase: (94,43%)	tahun			
			l. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 28.265.000,00 Realisasi: Rp. 26.715.000,00 Persentase: (94,52%)		(%)		
			m. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 160.430.000,00 Realisasi: Rp. 2.206.000,00 Persentase: (1,38%)		(%)	Dana tersebut bersumber dari DAK dan pada Polres terdapat anggaran dengan kegiatan dan peruntukan yang sama sehingga Anggaran di DP3APPKB tidak diserap	Kembali Kas Daerah
			n. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan	1 tahun (100.00%)		

			Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 8.955.000,00 Persentase: (89,55%)	prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan 1 tahun			
2.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	a.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	1) Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.999.400,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
		b.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 18.655.000,00 Persentase: (93,28%)	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				2) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Terlaksananya data dan	1 tahun (100.00%)		

				Anggaran: Rp. 115.000.000,00 Realisasi: Rp. 112.898.000,00 Persentase: (98,17%)	informasi keluarga 1 tahun			
				3) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.949.900,00 Persentase: (99,50%)	Terlaksananya pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
			c. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.588.000,00 Persentase: (97,25%)	Terlaksananya advokasi program KKBPK kepada Stakeholders 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal Anggaran: Rp. 95.000.000,00 Realisasi: Rp. 94.069.600,00 Persentase: (99,02%)	Terlaksananya KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal 1 tahun	1 tahun (100.00%)		

				3) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Anggaran: Rp. 203.404.000,00 Realisasi: Rp. 157.568.000,00 Persentase: (77,47%)	Tersedianya distribusi sarana KIE Program KKBPK 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				4) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 15.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruangan 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				5) Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK Anggaran: Rp. 1.080.726.600,00 Realisasi: Rp. 782.598.600,00 Persentase: (72,41%)	Terwujudnya pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
			d. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Anggaran: Rp. 971.124.000,00 Realisasi: Rp. 971.112.900,00 Persentase:	Terlaksananya penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP) 1 tahun	1 tahun (100.00%)		

				(100,00%)				
			e. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Anggaran: Rp. 110.320.000,00 Realisasi: Rp. 90.542.800,00 Persentase: (82,07%)	Terlaksananya pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke FAskes 41 faskes	41 faskes (100.00%)		
				2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Anggaran: Rp. 1.660.284.400,00 Realisasi: Rp. 1.270.458.500,00 Persentase: (76,52%)	Terlaksananya kesertaan penggunaan MKJP 20000 PB	20000 PB (100.00%)		
				3) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 1.500.000,00 Persentase: (30,00%)	Tersedianya dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP 1 tahun	1 tahun (100.00%)	Penyerapan sesuai dengan adanya laporan kasus komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	Kembali kas daerah
				4) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya sarana	1 tahun (100.00%)		

				Anggaran: Rp. 1.239.965.000,00 Realisasi: Rp. 1.106.090.900,00 Persentase: (89,20%)	penunjang pelayanan KB 1 tahun			
				5) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 10.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya pembinaan pelayanan KB dan Kespro 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				6) Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Anggaran: Rp. 5.000.000,00 Realisasi: Rp. 5.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				7) Peningkatan Kesertaan KB Pria Anggaran: Rp. 72.500.000,00 Realisasi: Rp. 45.500.000,00 Persentase: (62,76%)	Meningkatnya kesertaan KB Pria 1 tahun	1 tahun (100.00%)		

			f. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 19.995.000,00 Persentase: (99,98%)	Terlaksananya integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Anggaran: Rp. 839.936.000,00 Realisasi: Rp. 823.208.000,00 Persentase: (98,01%)	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
			g. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Anggaran: Rp. 280.000.000,00 Realisasi:	Terlaksananya pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 1 tahun	1 tahun (100.00%)		

				Rp. 256.485.000,00 Persentase: (91,60%)				
				2) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 15.000.000,00 Persentase: (100,00%)	Terlaksananya pelatihan teknis bagi kader K3 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				3) Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 17.980.000,00 Persentase: (89,90%)	Tersedianya fasilitasi pengelolaan K3 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				4) Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	Tersedianya Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	1 tahun (100.00%)		

				Keluarga/UPPKS) Anggaran: Rp. 594.800.000,00 Realisasi: Rp. 582.400.000,00 Persentase: (97,92%)	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan 1 tahun			
				5) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 19.250.000,00 Persentase: (96,25%)	Terlaksananya promosi hasil kegiatan penmgelolaan K3 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				6) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Anggaran: Rp. 20.000.000,00 Realisasi: Rp. 18.500.000,00 Persentase: (92,50%)	Terlaksananya kegiatan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan (Poktan) K3 100 %	100 % (100.00%)		

			h. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Ke masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Anggaran: Rp. 15.000.000,00 Realisasi: Rp. 14.625.000,00 Persentase: (97,50%)	Terlaksananya pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
				2) Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Anggaran: Rp. 90.000.000,00 Realisasi: Rp. 89.113.100,00 Persentase: (99,01%)	Terlaksananya peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan 1 tahun	1 tahun (100.00%)		

				3) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Anggaran: Rp. 10.000.000,00 Realisasi: Rp. 9.974.750,00 Persentase: (99,75%)	Terlaksananya promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja 1 tahun	1 tahun (100.00%)		
--	--	--	--	---	---	----------------------	--	--

C. URUSAN PILIHAN*Nihil***D. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG***Nihil*

BAB VII

INOVASI DAN PENGHARGAAN

A. INOVASI

No.	Nama Inovasi	Deskripsi
1	SAHABAT KEREN	Aplikasi SAHABAT KELUARGA BERENCANA yang dapat diakses masyarakat untuk memperoleh informasi, edukasi, dan komunikasi seputar pelayanan KB

B. PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1	Juara II BKB Percontohan, Lomba Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) HI Kab/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2021	DP3APPKB Provinsi Jawa Tengah
2	Juara IV Lomba Keluarga Teladan Tahun 2021	Perwakilan BKKBN Jawa Tengah
3	Pelaksana Terbaik Kedua Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Rangka Bhakti Sosial Bhayangkara Polres Karanganyar Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021	DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah
4	Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat Pratama Tahun 2021	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
5	Penghargaan sebagai Kabupaten Penerima Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 Kategori Pratama (diterimakan pada Tahun 2021)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

BAB VII

PENUTUP

1. KESIMPULAN

1. DP3APPKB Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 tugas dan fungsi dapat terlaksana dengan baik.
2. Anggaran DP3APPKB Kabupaten Karanganyar dapat terealisasi sebesar Rp.11.070.324.260 (88,04%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.574.186.000;

2. SARAN

Beberapa langkah yang ditempuh, agar kendala dan permasalahan tidak lagi terjadi pada Tahun Anggaran berikutnya, adalah :

1. Melakukan perbaikan manajemen pelaksanaan program kegiatan terutama pada pengendalian dan evaluasi kinerja
2. Meningkatkan kualitas *team work*
3. Melakukan perbaikan anggaran dan koordinasi antar program dalam melakukan penganggaran